



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 27 Februari 2017

Halaman: 4

E-Warong Kube PKH Bakal Ditambah

YOGYA (MERAPI) - Target angka kemiskinan yang belum terpenuhi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta selama ini telah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan pemberdayaan warga miskin yang tahun ini diupayakan bertambah.

Kepala Dinsos Kota Yogyakarta Hadi Muhtar menyatakan selama ini banyak program untuk menanggulangi kemiskinan. Ada pemberdayaan warga miskin, bantuan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah melalui Kartu Menuju Sehat (KMS). Namun diakui untuk menanggulangi kemiskinan tidak bisa cepat.

"Kita banyak program. Termasuk pemberdayaan masyarakat miskin supaya tidak hanya menerima bantuan-bantuan. Tapi memang tidak secepat yang dibayangkan. Ya bertahap," kata Hadi, Minggu (26/2).

Dia menjelaskan salah satu program pemberdayaan warga miskin yakni melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Termasuk KUBE penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Bentuk pemberdayaan itu melalui elektronik Warung (e-warong) Gotong Royong KUBE PKH. Dia menyebutkan akan mengusulkan pembentukan e-warong ditambah menjadi 20 dari usulan awal 15 e-warong. Kementerian Sosial akan memberikan bantuan modal Rp 30 juta untuk setiap e-warong itu. Keberadaan e-warong itu juga untuk mendukung penerima bantuan pangan nontunai membelanjakan kebutuhan.

"Kita usulkan tambahan lima e-warong lagi. Itu juga untuk memberdayakan warga miskin. Dengan pemberdayaan lewat

KUBE, harapan kita warga miskin bisa *mentas* dan mandiri," ucapnya.

Menurutnya dalam penanggulangan kemiskinan, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinsos. Pemkot Yogyakarta, lanjutnya, juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah lain untuk terlibat mengarahkan program terkait untuk menanggulangi kemiskinan. Misal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada program pemberdayaan ada tugas mengawal usaha mikro warga miskin.

Dalam RPJMD 2016 Kota Yogyakarta angka kemiskinan ditargetkan mencapai 8,4 persen dari jumlah penduduk di Yogyakarta. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 angka kemiskinan di Yogyakarta mencapai 8,75 persen dari jumlah penduduk. Itu berarti target angka kemiskinan belum tercapai.

Melihat data penerima KMS tahun 2017 ditetapkan sebanyak 18.651 Kepala Keluarga (KK). Jumlah itu turun meski tidak signifikan dibandingkan data tahun 2016 yang mencapai 18.730 KK. Dia menilai perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan KMS karena beda parameter.

Kalau BPS melihat secara umum, tapi KMS secara wilayah dengan melihat kondisi sosial ekonomi. Tapi memang mestinya kalau bisa *mentas* di KMS harusnya juga bisa *mentas* di BPS. Itu bertahap," papar Hadi.

Pihaknya juga mengkaji perubahan parameter penerima KMS, agar pemanfaatannya lebih maksimal. Di samping itu selama ini parameter KMS mengacu pada Surat Keputusan Walikota Yogya Nomor 244/KEP/2012. Sedangkan seiring waktu ada perkembangan, sehingga perlu ada perubahan. Namun perubahan parameter itu akan diajukan setelah ada kepala daerah definitif. (Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005